

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 17 TAHUN 2007
TENTANG PENYELENGGARAAN PEKAN DAN KEJUARAAN OLAHRAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjaring bibit olahragawan potensial, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, meningkatkan prestasi menumbuhkembangkan industri olahraga, dan mendukung percepatan pembangunan daerah, perlu melakukan perubahan pengaturan penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga sesuai dengan perkembangan olahraga dan kebutuhan masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan pekan dan Kejuaraan Olahraga;
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703);

- 2 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 17 TAHUN 2007 TENTANG PENYELENGGARAAN PEKAN DAN KEJUARAAN OLAHRAGA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan kejuaraan olahraga meliputi pekan olahraga dan kejuaraan olahraga.
- (2) Pekan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pekan olahraga internasional;
 - b. pekan olahraga nasional;
 - c. pekan olahraga wilayah; dan
 - d. pekan olahraga daerah.
- (3) Kejuaraan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kejuaraan olahraga tingkat internasional;
 - b. kejuaraan olahraga tingkat nasional;
 - c. kejuaraan olahraga tingkat wilayah;
 - d. kejuaraan olahraga tingkat provinsi; dan
 - e. kejuaraan olahraga tingkat kabupaten/kota.
- (4) Penyelenggaraan pekan olahraga dan kejuaraan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi.

- 3 -

(5) Ketentuan mengenai jenis pekan olahraga dan kejuaraan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Menteri.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Pekan olahraga tingkat internasional meliputi:

- a. pekan olahraga dunia (*Olympic Games* dan *Paralympic Games*);
- b. pekan olahraga Asia (*Asian Games* dan *Asian Para Games*);
- c. pekan olahraga Asia Tenggara (*South East Asian Games* dan *South East Asian Para Games*); dan
- d. pekan olahraga tingkat internasional lainnya.

3. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Keikutsertaan Indonesia dalam pekan olahraga tingkat internasional bertujuan untuk mewujudkan persahabatan dan perdamaian antarbangsa serta meningkatkan harkat dan martabat bangsa melalui pencapaian prestasi olahraga.
- (2) Keikutsertaan Indonesia dalam pekan olahraga tingkat internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam ruang lingkup kegiatan olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi.
- (3) Keikutsertaan Indonesia dalam pekan olahraga tingkat internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan oleh KOI.

- 4 -

4. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Pekan olahraga nasional diselenggarakan dengan tujuan:
 - a. memelihara persatuan dan kesatuan bangsa;
 - b. menjaring bibit olahragawan potensial; dan
 - c. meningkatkan prestasi olahraga.
 - (2) Penyelenggaraan pekan olahraga nasional harus memberikan dampak pengembangan potensi ekonomi dan industri olahraga.
 - (3) Pemerintah bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pekan olahraga nasional.
 - (4) Tanggung jawab Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Menteri.
 - (5) Menteri dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menugaskan komite olahraga nasional selaku penyelenggara.
5. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Menteri menetapkan tugas komite olahraga nasional sebagai penyelenggara pekan olahraga nasional dalam hal:
 - a. perencanaan;
 - b. pengorganisasian;
 - c. pelaksanaan; dan
 - d. pengawasan.
- (2) Komite olahraga nasional dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melakukan evaluasi dan pelaporan.
- (3) Tugas komite olahraga nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup penentuan:
 - a. jumlah peserta;
 - b. cabang olahraga yang dipertandingkan;

- 5 -

- c. persyaratan olahragawan; dan
 - d. waktu penyelenggaraan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagai penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) komite olahraga nasional wajib berkoordinasi dengan pemerintah provinsi yang telah ditetapkan sebagai tuan rumah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas komite olahraga nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.
6. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Komite olahraga nasional melalui musyawarah olahraga nasional menetapkan paling banyak 3 (tiga) calon tuan rumah pelaksana pekan olahraga nasional.
- (2) Calon tuan rumah pelaksana pekan olahraga nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas 1 (satu) pemerintah provinsi atau gabungan pemerintah provinsi.
- (3) Penetapan calon tuan rumah pelaksana pekan olahraga nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. kemampuan dan potensi pemerintah provinsi calon tuan rumah pelaksana;
 - b. ketersediaan prasarana dan sarana serta kemampuan pemeliharaan dan perawatannya;
 - c. dukungan masyarakat setempat; dan
 - d. pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga di masing-masing provinsi.
- (4) Penetapan calon tuan rumah pelaksana pekan olahraga nasional berupa gabungan pemerintah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) juga harus mempertimbangkan:

- 6 -

- a. letak geografs wilayah provinsi berdekatan;
 - b. ketersediaan prasarana dan sarana antar dan lintas daerah;
 - c. potensi sumber daya masing-masing daerah; dan
 - d. dapat bekerja sama.
- (5) Komite olahraga nasional mengajukan 3 (tiga) calon tuan rumah pelaksana pekan olahraga nasional yang telah ditetapkan sebagai calon tuan rumah pelaksana pekan olahraga nasional kepada Menteri.
 - (6) Menteri menetapkan 1 (satu) tuan rumah pelaksana pekan olahraga nasional.
 - (7) Pemerintah provinsi yang telah ditetapkan sebagai tuan rumah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pekan olahraga nasional.
 - (8) Ketentuan mengenai mekanisme pertanggung jawaban terhadap pelaksanaan pekan olahraga nasional diatur dengan Peraturan Menteri.
7. Di dalam Bab II ditambahkan 1 (satu) bagian, yakni Bagian Ketujuh sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketujuh
Pekan Olahraga Rekreasi Nasional

Pasal 25A

- (1) Penyelenggaraan pekan olahraga rekreasi nasional bertujuan untuk:
 - a. memassalkan olahraga sebagai upaya mengembangkan kesadaran masyarakat dalam peningkatan kesehatan;
 - b. meningkatkankebugaran;
 - c. meningkatkan kegembiraan; dan
 - d. peningkatan hubungan sosial.
- (2) Pekan olahraga rekreasi nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara periodik dan berkesinambungan.

- 7 -

- (3) Pekan olahraga rekreasi nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diikuti oleh komunitas olahraga rekreasi dari setiap provinsi.
 - (4) Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang budaya dan pariwisata bertanggung jawab atas penyelenggaraan pekan olahraga rekreasi.
 - (5) Dalam rangka pelaksanaan pekan olahraga rekreasi nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Menteri dapat membentuk panitia penyelenggara dengan melibatkan organisasi olahraga rekreasi.
 - (6) Menteri menetapkan pemerintah provinsi sebagai tuan rumah pelaksana pekan olahraga rekreasi nasional dengan memperhatikan:
 - a. kemampuan dan potensi pemerintah provinsi calon tuan rumah pelaksana;
 - b. ketersediaan prasarana dan sarana;
 - c. dukungan masyarakat setempat;
 - d. pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga calon tuan rumah pelaksana; dan
 - e. usulan dari organisasi olahraga rekreasi.
 - (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pekan olahraga rekreasi nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) diatur dengan Peraturan Menteri.
8. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Kejuaraan olahraga di tingkat internasional bertujuan untuk:
 - a. Meningkatkan prestasi olahraga;
 - b. mewujudkan persahabatan dan perdamaian antar bangsa;
 - c. memberikan pengalaman bertanding;
 - d. meningkatkan harkat dan martabat bangsa; dan

- 8 -

- e. menumbuhkan semangat dan kebanggaan nasional.
- (2) Kejuaraan olahraga nasional, kejuaraan olahraga wilayah, kejuaraan olahraga provinsi, dan kejuaraan olahraga kabupaten kota bertujuan untuk:
 - a. Meningkatkan prestasi olahraga;
 - b. menjaring bibit olahragawan potensial;
 - c. memassalkan olahraga;
 - d. memberikan pengalaman bertanding; dan
 - e. memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.
 - (3) Penyelenggaraan kejuaraan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus memberikan dampak pengembangan potensi ekonomi dan industri olahraga.

Pasal II

1. Peraturan pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan
2. Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

- 9 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Januari 2020
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 Januari 2020
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 27

- 10 -

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 17 TAHUN 2007
TENTANG PENYELENGGARAAN PEKAN DAN KDJUARAAN OLAHRAGA

I. UMUM

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraa, Pekan dan Kejuaraan Olahraga. Peraturan Pemerintah tersebut mengatur hal-hal pokok yang berkaitan dengan penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga.

Perubahan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga dimaksudkan untuk menyempurnakan beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah tersebut sehingga dapat mendukung penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga yang disesuaikan dengan perkembangan yang ada di bidang keolahragaan dan kebutuhan masyarakat.

Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga perlu diimbangi dengan semangat perkembangan olahraga. Saat ini terdapat beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah tersebut yang dinilai belum mampu menyesuaikan dengan perkembangan yang ada di bidang keolahragaan dan kebutuhan masyarakat.

Tujuan dari penyelenggaraan pekan olahraga nasional perlu diarahkan tidak hanya pada memelihara persatuan dan kesatuan bangsa, menjalin bibit olahragawan potensial, dan peningkatan prestasi olahraga, namun juga sebagai sarana pengembangan potensi ekonomi dan industri olahraga. Dalam rumusan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga, penyelenggaraan pekan olahraga nasional sepenuhnya didelegasikan kepada komite olahraga nasional selaku penyelenggara, sehingga peran Menteri dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pekan olahraga nasional belum maksimal.

Selain itu, penyelenggaraan Pekan Olahraga Rekreasi Nasional belum diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga. Penyelenggaraan Pekan Olahraga Rekreasi Nasional perlu diselenggarakan secara periodik dan berkesinambungan dengan tujuan untuk:

1. memassalkan olahraga sebagai upaya mengembangkan kesadaran masyarakat dalam meningkatkan kesehatan;
2. meningkatkan kebugaran;
3. meningkatkan kegembiraan; dan
4. meningkatan hubungan sosial.

Berdasarkan hal tersebut, perlu melakukan perubahan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga. Substansi perubahan dimaksud antara lain:

1. penyelenggaraan pekan olahraga nasional harus memberikan dampak bagi pengembangan potensi ekonomi dan industri olahraga.
2. pengaturan mengenai pelaksana pekan olahraga nasional dapat dilaksanakan lebih dari 1 (satu) tuan rumah pemerintah provinsi.
3. penguatan tanggung jawab Pemerintah dalam penyelenggaraan pekan olahraga nasional.
4. pengaturan penyelenggaraan Pekan Olahraga Rekreasi Nasional.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1

Pasal 2

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 4

huruf a

Cukup jeias.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Yang dimaksud dengan "pekan olahraga internasional lainnya" antara lain *Asian Beach Games, Islamic Solidarity Games, dan The Association For International Sport for All (TAFISA) World Sport For All Games.*

Angka 3

Pasal 5

Cukup jelas

Angka 4

Pasal 10

Cukup jelas

Angka 5

Pasal 11

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "gabungan pemerintah provinsi" adalah penggabungan 2 (dua) atau lebih pemerintah provinsi menjadi tuan rumah pelaksana pekan olahraga nasional.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (a)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Angka 7

Pasal 25A

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "organisasi olahraga rekreasi" adalah komite olahraga nasional dalam lingkup olahraga rekreasi.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Angka 8

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas